

DAFTAR BACAAN

- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat* Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1981.
- Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi* Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* Bandung: CV Mandar Maju, 2003.
- Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010).
- Irfan Nur Rahman, et.al., *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011.
- Limei Pasaribu, “*Keberadaan Hak Ulayat dalam Masyarakat Hukum Adat Batak Toba di Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir*”, Tesis, Ilmu Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan,USU, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005.
- Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, Jakarta: UNDP Regional Centre in Bangkok, 2006.
- Sahya anggara dan endang soetari, *kebijakan publik pengantar*,2014.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Taqwaddin, “*Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh*”, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010.
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)* (Bandung: Alfabeta, 2008).

Yance Arizona., *Satu Dekade Legislasi Masyarakat adat: Trend Legislasi Nasional tentang Keberadaan dan Hak-Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia (1999-2009)*.

Zaidar, *Dasar Filosofi Hukum Agraria Indoneisa* Medan: Pustaka Bangsa Press, 2010.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2010 Tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan hutan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2012 Rencana Tata Ruang Tahun 2012-2032.

JURNAL DAN HARIAN:

Siaran Pers – *selamatkan pulau-pulau kecil (kasus kepulauan aru)* jakarta, 17 desember 2014.

TEMPO.CO, Jakarta - Kamis, 14 Mei 2015 | 15:55 WIB presiden republik Indonesia Jokowi Perpanjang Moratorium Izin Hutan, Isinya Belum Jelas.

Prosedur permonan izin usaha pelepasan kawasan hutan yang dapat di konversikan (HPK, KEMENTRIAN KEHUTANAN SEKERTARIAT KEMENTRIAN KEHUTANAN Gd. Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti, Jakarta 2010/2011.

I Nyoman Nurjaya, “*Antropologi Hukum: Tema Kajian, Metodologi, Dan Penggunaannya Untuk Memahami Fenomena Hukum Di Indonesia*”, Makalah. Dipresentasikan dalam Serial Kuliah Tamu dengan Tema: *Kajian Hukum, Politik dan Organisasi Sosial dalam Tinjauan Antropologi*, diselenggarakan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya pada tanggal 6 April 2013.

Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia., *Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): Perspektif Hukum dan Keadilanterkait dengan status MHA dan Hak-Hak Konstitusionalnya.*

Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Mahyuni, Makalah “*Pengakuan Dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Ada Serta Hak-Hak Tradisionalnya Di Provinsi Kalimantan Selatan.*

WEBSITE:

<http://ikomatussuniah-design.blogspot.co.id/2012/03/hukum-perizinan.html>, september , 2015.

<http://fwi.or.id/publikasi/hutan-alam-di-kepulauan-arau-terancam-hilang/>, oktober, 2015.

[http://nasional.tempo.co/read/news/2015/05/14/206666288/jokowi-perpanjang moratorium-izin-hutan-isinya-belum-jelas](http://nasional.tempo.co/read/news/2015/05/14/206666288/jokowi-perpanjang-moratorium-izin-hutan-isinya-belum-jelas), oktober, 2015.

<http://pengertian-definisi.blogspot.co.id/2012/03/pengertian-dan-definisi-hutan-primer.html>, oktober, 2015

Makalah.[http://mahyunish.blogspot.com/2013/09/makalah-pengakuan-dan penghormatan.html](http://mahyunish.blogspot.com/2013/09/makalah-pengakuan-dan-penghormatan.html), oktober, 2015.

